



IKATAN  
PENDUKUNG  
KEMERDEKAAN  
INDONESIA

## KAJIAN LANJUTAN



# Terkait Revisi Undang-Undang TNI dan Penempatan Prajurit Aktif dalam Jabatan Sipil

DEWAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA

Bagian dari

**KAJIAN STRATEGIS KEBIJAKAN NASIONAL ( KSKN )**

**DEWAN PENGURUS PUSAT**

**IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA**

**( DPP IP-KI )**

**Tanggal Terbit :**

Rabu, 12 Maret 2025

**Tim Penulis, Desain dan Layout :**

Sekretaris Jenderal DPP IP-KI, Troy Aldi Pratama  
Tim Kesekjenan DPP IP-KI

# REVISI UNDANG-UNDANG TNI DAN PENEMPATAN PRAJURIT AKTIF DALAM JABATAN SIPIL

Oleh  
**Troy Aldi Pratama**  
Sekretaris Jenderal DPP IP-KI

Sebagai organisasi kebangsaan yang berkomitmen terhadap tegaknya nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, dan profesionalisme TNI dalam sistem pertahanan negara, **DPP IP-KI menyampaikan sikap resmi terkait revisi Undang-Undang TNI, khususnya mengenai penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil.**



## 1. Supremasi Sipil: Pilar Demokrasi yang Harus Dijaga

TNI adalah pilar pertahanan negara, bukan instrumen politik atau birokrasi sipil. **DPP IP-KI menolak perluasan cakupan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif di luar ketentuan yang sudah ada dalam UU TNI sebelumnya.** Sejarah mencatat bahwa **ABRI Masuk Desa** yang awalnya dimaksudkan untuk percepatan pembangunan pedesaan, pada akhirnya memunculkan resistensi karena dianggap terlalu dalam masuk ke ranah sipil. Jangan sampai kebijakan baru ini mengulang sejarah dalam bentuk yang lebih modern.

Jika kita melihat praktik di berbagai negara, **modernisasi militer selalu beriringan dengan pembatasan peran tentara di pemerintahan sipil**. Di negara-negara dengan supremasi sipil kuat seperti Jepang dan Jerman, tidak ada ruang bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan sipil. Sebaliknya, di negara-negara dengan keterlibatan militer dalam pemerintahan, sering terjadi instabilitas politik.

## 2. Data Perbandingan Global

Berikut adalah tabel perbandingan posisi militer dalam pemerintahan sipil di berbagai negara:

Negara	Kebijakan TNI/Militer dalam Jabatan Sipil	Dampak Terhadap Demokrasi
Jepang	Tidak ada militer dalam birokrasi sipil	Demokrasi stabil, profesionalisme militer tinggi
AS	Hanya untuk posisi tertentu dengan persetujuan Kongres	Militer tetap profesional, supremasi sipil terjaga
Indonesia (usulan revisi UU TNI)	Perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif	Risiko tumpang tindih kewenangan dan militerisasi pemerintahan

## 3. Risiko Sosiologis, Geopolitik, dan Kepercayaan Publik

### A. Dari Perspektif Sosiologis

Revisi UU TNI berpotensi mengubah hubungan antara militer dan masyarakat. Masyarakat sipil bisa merasa diawasi oleh unsur militer dalam birokrasi, memunculkan rasa tidak nyaman dan mengurangi kebebasan demokratis. **Kita sudah pernah mengalami ini di masa Orde Baru, ketika dominasi militer dalam pemerintahan menciptakan ketimpangan antara sipil dan militer.**

### B. Dari Perspektif Geopolitik

Indonesia saat ini menjadi pusat perhatian di Asia Tenggara, terutama dalam dinamika pertahanan dan hubungan luar negeri. **Negara-negara demokrasi maju akan melihat keterlibatan militer dalam birokrasi sebagai kemunduran demokrasi.** Ini bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan kepercayaan mitra internasional terhadap stabilitas politik kita.

### C. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap TNI selalu tinggi. **Survei tahun 2024 dari LSI menunjukkan bahwa 84% rakyat Indonesia percaya pada TNI sebagai institusi pertahanan yang profesional.** Namun, jika revisi ini diterapkan, citra profesionalisme TNI bisa menurun. Masyarakat bisa melihatnya sebagai upaya untuk memperluas pengaruh militer dalam pemerintahan, bukan sebagai bagian dari transformasi pertahanan yang sehat.

#### 4. Frasa "Serba Bisa" yang mengkhawatirkan

Salah satu poin yang paling mengkhawatirkan dari revisi UU TNI adalah frasa **"serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan kebijakan Presiden"**. Frasa ini sangat longgar dan dapat dimanipulasi untuk memperluas peran militer dalam pemerintahan.

**Jika tidak ada pembatasan tegas, tidak ada jaminan bahwa suatu saat nanti tidak akan muncul kembali model dwifungsi ABRI dalam bentuk baru.** Oleh karena itu, DPP IP-KI dengan tegas menolak frasa ini dan meminta agar kebijakan tetap dibatasi sesuai UU yang sudah ada.

#### 5. Evaluasi Usia Pensiun dan Regenerasi TNI

Kenaikan usia pensiun bintanga dan tamtama dari 53 tahun menjadi 58 tahun harus dievaluasi lebih dalam. **Jangan sampai kebijakan ini memperlambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.** Negara-negara dengan angkatan bersenjata yang modern justru mempercepat regenerasi dan memastikan perwira muda mendapatkan kesempatan kepemimpinan lebih cepat.

#### 6. TNI Aktif yang Masuk ke Jabatan Sipil Harus Pensiun Terlebih Dahulu

DPP IP-KI mendukung mekanisme yang telah diusulkan oleh Kementerian Pertahanan, yaitu **setiap prajurit TNI yang akan memasuki jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif.**

Langkah ini diperlukan untuk:

- **Menjaga profesionalisme TNI** agar tetap fokus pada tugas pertahanan negara.
- **Mencegah konflik kepentingan** yang dapat muncul akibat kedudukan ganda sebagai prajurit dan pejabat sipil.
- **Menjamin netralitas TNI dalam politik dan pemerintahan**, sebagaimana diatur dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

#### 7. Mendorong Pembahasan RUU yang Lebih Transparan dan Berbasis Kajian

DPP IP-KI mendukung langkah DPR untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU TNI. Namun, **pembahasan ini harus didasarkan pada kajian akademik dan bukan hanya kepentingan politik jangka pendek.**

Kami mendesak agar revisi ini:

- **Dibahas secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.**
- **Mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.**
- **Memastikan profesionalisme TNI tetap terjaga.**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian di atas, **DPP IP-KI menyatakan bahwa revisi UU TNI harus tetap mengedepankan supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta menjaga keseimbangan antara pertahanan negara dan demokrasi.**

Kami mendesak para pemangku kebijakan untuk **menghindari regulasi yang dapat membuka ruang dominasi militer dalam pemerintahan sipil dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan.**

***Sekali Layar Berkembang, Surut Kita Berpantang!***